

Research Article

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani

Universitas Sebelas Maret

E-mail: anggrainiokta@student.uns.ac.id

Desi Alia Putri Astuti

Universitas Sebelas Maret

E-mail: desialiapa@student.uns.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Quality, Journal of Education, Arabic and Islamic Studies.

Received : March 21, 2026

Revised : April 29, 2026

Accepted : May 15, 2026

Available online : May 31, 2026

How to Cite: Anggraini Oktavia Ramadhani, & Alia Putri Astuti, D. (2026). Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 4(2), 193–208. <https://doi.org/10.58355/qwt.v4i2.126>

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic government initiative aimed at addressing nutritional problems and improving the quality of human resources, while also serving as a concrete manifestation of the state's obligation to fulfill citizens' fundamental right to adequate food. This study aims to critically analyze the challenges in implementing the program and examine the legal accountability mechanisms involved. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from relevant books and scientific journals. The discussion shows that the program's juridical foundation is firmly rooted in the 1945 Constitution and Pancasila as an embodiment of social justice. However, field implementation faces significant obstacles, including inaccuracies in beneficiary data prone to human error, the complexity of logistical distribution, and issues regarding food quality that is sometimes unfit for consumption. Failures in these aspects risk violating children's constitutional rights and causing budget inefficiency. Therefore, improvement strategies are needed, including digitalization of reporting data, clear Standard Operating Procedures (SOPs) for

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

logistics, and multilayered supervision involving public participation to ensure that the program runs accurately, transparently, and accountably.

Keywords: Pancasila, Rights and Obligations, Value Implementation, Citizenship, Social Balance.

Program Makan Bergizi Gratis: Memastikan Hak Terpenuhi dan Kewajiban Terlaksana Tepat Sasaran

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara (state obligation) untuk memenuhi hak dasar warga negara atas pangan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis tantangan implementasi program tersebut serta mengkaji mekanisme akuntabilitas hukum dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa landasan yuridis program ini berakar kuat pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai wujud keadilan sosial. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala signifikan meliputi validitas data penerima yang rentan kesalahan (human error), kompleksitas distribusi logistik, serta isu kualitas makanan yang kadang tidak layak konsumsi. Kegagalan dalam aspek ini berisiko mencederai hak konstitusional anak dan menyebabkan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan melalui digitalisasi data pelaporan, penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) logistik yang jelas, serta pengawasan berlapis yang melibatkan partisipasi publik guna memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Keywords: Pancasila, Hak dan Kewajiban, Implementasi Nilai, Warga Negara, Keseimbangan Sosial.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif unggulan yang diluncurkan oleh pemerintah. Program ini memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah gizi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan fokus khusus pada anak-anak dan ibu hamil. Investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama pembangunan nasional (Kevin Andreas Halomoan Tambunan et al., 2025). Fondasi dari SDM yang berkualitas terletak pada pemenuhan gizi yang memadai sejak usia dini, yang terbukti secara ilmiah memiliki dampak langsung terhadap perkembangan kognitif, kesehatan fisik, dan produktivitas ekonomi di masa depan (Behrman, 2020). Dalam konteks pendidikan, rencana pembagian makan bergizi di sekolah ini diharapkan dapat memberikan keadilan, di mana semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengonsumsi makanan bergizi secara gratis tanpa memandang status ekonomi atau sosial mereka.

Program ini esensinya harus diposisikan lebih dari sekadar program bantuan sosial. Ia adalah manifestasi konkret dari kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhi hak dasar warga negara (*citizen's rights*) atas pangan dan gizi yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaksanakannya, dan warga negara memiliki hak untuk menuntut pemenuhannya. Namun, hukum yang kuat seringkali terbentur oleh realita implementasi di lapangan. Sejarah program intervensi sosial berskala besar di Indonesia menunjukkan kerentanan yang signifikan terhadap tiga isu: validitas data (siapa yang berhak menerima), kompleksitas logistik (bagaimana mendistribusikannya), dan akuntabilitas anggaran (bagaimana mengawasinya).

Kegagalan dalam memastikan program ini, tepat sasaran tidak hanya berimplikasi pada inefisiensi anggaran negara. Lebih jauh lagi, hal tersebut berarti kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis tantangan kritis dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan merumuskan strategi untuk memastikan agar hak warga terpenuhi secara efektif dan kewajiban negara terlaksana secara transparan.

Ketepatan sasaran, yang berawal dari validitas data, adalah fondasi program yang berkeadilan. Di tingkat nasional, ini berarti memastikan data penerima akurat untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Dalam penelitian (Kevin Andreas Halomoan Tambunan et al., 2025) program ini diberikan kepada seluruh siswa, yaitu 849 siswa. Proses pencatatan manual untuk ratusan siswa sangat rentan terhadap *human error* dan memakan waktu. Proses manual ini, jika diterapkan dalam skala nasional jangka panjang, akan sangat tidak efisien dan menyulitkan pelaporan akurat, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas anggaran.

Selain data, (Kevin Andreas Halomoan Tambunan et al., 2025) menyoroti bagaimana proses pendistribusian makanan kepada siswa memakan waktu yang sangat lama. Sekolah terpaksa berinisiatif membentuk panitia *ad-hoc* yang melibatkan OSIS, menunjukkan bahwa pemerintah belum menyiapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas untuk distribusi tingkat sekolah. Beban ini memindahkan fokus guru dan siswa dari kegiatan belajar-mengajar. Masalah logistik paling krusial adalah menjaga kualitas makanan. Dalam penelitian tersebut, ditemukan masalah serius di mana makanan yang diterima dari catering terkadang sudah basi atau tidak layak konsumsi. Ini adalah kegagalan fatal dalam pemenuhan “hak atas gizi” dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap vendor. Konsekuensi logistik lain yang sering dilupakan adalah pengelolaan limbah, di mana peningkatan jumlah sampah kemasan menciptakan masalah kebersihan baru, yang memunculkan usulan agar siswa membawa tempat makan sendiri.

Mengakui program ini sebagai “Hak dan Kewajiban” berarti implementasinya tidak boleh sekedar menggugurkan kewajiban. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang kokoh. Digitalisasi data dan pelaporan *real-time* melalui platform terpadu dapat mengatasi masalah data manual yang rentan kesalahan. Ini harus didukung oleh SOP logistik yang jelas, yang mungkin dapat melibatkan UMKM catering lokal untuk memperpendek rantai pasok dan mengurangi risiko makanan basi. Kontrak dengan catering pun harus mencakup standar kualitas

yang ketat dengan sanksi tegas. Selain itu, pengawasan harus bersifat berlapis, tidak hanya *top-down* dari dinas, tetapi juga *bottom-up* dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua, serta menyediakan kanal aduan yang mudah diakses. Kebijakan wajib membawa tempat makan sendiri juga harus dipertimbangkan secara serius untuk mengatasi masalah sampah secara sistemik.

Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah kontrak sosial yang fundamental antara negara dan warganya; sebuah penegasan bahwa negara berkewajiban memenuhi hak dasar atas gizi untuk generasi masa depannya. Tantangan nyata dalam hal data, distribusi logistik yang rumit, kualitas makanan yang tidak terjamin, dan pelaporan yang rawan manipulasi adalah hambatan yang bisa menggagalkan tujuan mulia ini. Keberhasilan program tidak diukur dari jumlah anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa efektif, transparan, dan akuntabel setiap rupiah anggaran itu berubah menjadi gizi yang nyata bagi siswa. Tanpa pembenahan tata kelola yang serius, "hak" warga akan tetap menjadi ilusi dan "kewajiban" negara hanya akan menjadi wacana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data serta untuk mengungkapkan bahan pembahasan dalam penulisan artikel ini. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari berbagai buku maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan utama yang berkaitan dengan kajian sehingga kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan ide atau gagasan penulis. Penggunaan metode studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung penulisan artikel ini menyebutkan bahwa hasil dari studi literatur dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil

Tabel 1. Literature Review

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Kevin Andreas Halomoan Tambunan, Ridha Nababan 2025	Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa	Kualitatif	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif unggulan yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utama program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan fokus khusus

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

				pada anak-anak dan ibu hamil.
2.	Kiftiyah A, Palestina F 2025	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik	Kualitatif	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran. Salah satu tujuan MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelajar. Lebih lanjut pelaksanaan program MBG masih banyak menuai kritik dan pertanyaan. Penelitian ini akan membahas apakah program ini sudah tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata sesuai dengan implementasi sila ke lima, serta pelaksanaan program MBG ditinjau dari aspek dinamika sosial-politik.
3.	Rahmatullah B, Saputra S 2025	Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes	Kualitatif	Penelitian ini menerapkan algoritma Naive Bayes untuk menganalisis komentar positif atau negatif terkait makan bergizi gratis di platform youtube sekretariat negara mengenai makan bergizi gratis.
4.	Rifiy Qomarrullah, Suratni 2025	The Long-Term Impact Of The Free Nutritious Meal Program On Health And Educational	Kualitatif	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah dan mendukung

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

		Sustainability		keberlanjutan pendidikan. Urgensi program ini terletak pada perannya dalam mengatasi ketimpangan gizi, meningkatkan daya konsentrasi, serta mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
5.	Oktawila D, Estu Bagijo H 2025	Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis	Kualitatif	Program makan bergizi gratis adalah rencana pemberian makan bergizi di sekolah ataupun pesantren untuk memperbaiki gizi para pelajar. Estimasi jumlah penerima manfaat (secara nasional) program makan bergizi gratis untuk 514 kabupaten/ kota dengan total anak sekolah yaitu 16.110.000 juta pelajar.
6.	Albaburrahim A, Putikadyanto A 2025	Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045	Kualitatif	Penelitian ini menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program Prabowo Subianto sebagai upaya strategis untuk mempercepat transformasi pendidikan Indonesia untuk mencapai visi Generasi Emas 2045.

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

7.	Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, A. Octamaya Tenri Awaru 2025	Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar	Kualitatif	Tujuan penelitian ini mengevaluasi dampak program terhadap kesejahteraan pelajar, khususnya dari aspek kesehatan, kehadiran, dan konsentrasi belajar. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Pustaka (library research), yang menganalisis aliran-aliran filsafat yang ada baik rasionalisme dan kebijakan publik pada program Makan Bergizi Gratis.
8.	Ajeng Atikah Merlinda Y 2025	Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan	Kualitatif	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan motivasi belajar siswa di Indonesia. Program ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar, yang berdampak negatif pada konsentrasi dan prestasi akademik mereka.

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

9.	Behrman J 2020	The Economic Rationale For Investing In Nutrition In Developing Countries	Kualitatif	Studies of experimental and socioeconomic survey data on the direct productivity effects of nutrition indicate growing, though qualified, evidence of positive direct effects of nutrition on labor productivity of poorer individuals in developing countries-greater productivity effects for nutrition than for formal schooling. Studies on the indirect productivity effects of nutrition through cognitive achievement, schooling, and preschool ability also indicate positive productivity effects through these channels.
10.	Suwoto Mulyosudarmo S, Cornelis V 2025	Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan Landasan Hukum Dan Hak Konstitusional	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan, keunggulan, peluang, dan risiko dari Implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis di Indonesia dan Belanda.

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

11.	Aiza Yolanda A 2025	Anggaran Makan Bergizi Gratis: Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Apbn	Kualitatif	Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tujuan untuk memberikan makan bergizi kepada sekitar 19,47 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil atau menyusui. Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk dukungan manajemen.
12.	Trisno Aji, Wahyu 2025	Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?	Kualitatif	Program Makan Gratis ini merupakan program yang berada pada dilema implementasi, apalagi secara lebih khusus dalam persoalan anggarannya berasal dari mana dan sejauh mana atensi program Makan Siang Gratis dibandingkan program urgensi lainnya, secara lebih khusus mengenai permasalahan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan lain sebagainya. Jika hanya di tanyakan apakah program Makan Gratis relevan atau tidak?, maka jawabannya tidaklah patut dicari di tulisan ini. Sebab artikel ini tidak secara

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

				keseluruhan menjelaskan tentang berguna atau tidak dan penting atau tidak Makan Gratis menjadi prioritas di Indonesia.
13.	Yelvianti, Tuti 2025	Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi Dan Pendidikan Para Siswa Di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,8% dan anemia sebesar 5,4% pada siswa sekolah dasar. Selain itu, kehadiran siswa meningkat 12% dan konsentrasi belajar naik 15%. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan status gizi dan capaian pendidikan siswa, terutama di daerah tertinggal.
14.	Sumantri Riyanto O, Rianita Elfrida Sinaga M 2025	Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara	Kualitatif	Penegakan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis, merupakan hak fundamental anak yang telah terjamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Kerentanan dalam sistem pengawasan mutu pangan, keterbatasan alokasi sumber daya, dan perbedaan kapasitas teknis di berbagai tingkatan pelaksanaan program secara

				kumulatif menciptakan risiko nyata keracunan makanan, sebuah ancaman yang seharusnya dapat dicegah.
15.	Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, A. Octamaya Tenri Awaru 2025	Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar	Kualitatif	Program MBG memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial, terutama dalam meningkatkan akses pangan dan pendapatan sektor terkait. Namun, dari segi efektivitas jangka panjang, program ini harus diimbangi dengan keberlanjutan pendanaan dan upaya sinergi dengan program pembangunan sumber daya manusia yang komprehensif, agar manfaatnya benar-benar maksimal dan tidak menambah beban fiskal yang besar.

Pembahasan

Landasan Yuridis Program sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Konstitusional

Landasan utama program ini bukanlah sekadar program karitatif atau bantuan sosial semata, melainkan sebuah instrumen yuridis untuk melaksanakan kewajiban negara yang fundamental. Hak atas pangan dan gizi yang memadai bagi anak merupakan hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 dan berbagai kovenan internasional.

a. UUD 1945: Mandat Konstitusional untuk Keadilan Sosial

UUD 1945, khususnya Pasal 28C (hak anak untuk berkembang), Pasal 28H (hak atas jaminan sosial dan pelayanan kesehatan), dan Pasal 34 (negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar), serta Sila Kelima Pancasila (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Kebijakan ini adalah landasan filosofis dan yuridis tertinggi. Negara tidak hanya boleh tetapi wajib (*state obligation*) untuk menjamin kesejahteraan warganya. Seperti yang dianalisis oleh (Kiftiyah et al., 2025a) dan (Oktawila & Estu Bagijo, 2025), program ini diterjemahkan sebagai wujud "keadilan distributif" Pancasila. UUD 1945 memerintahkan negara untuk hadir dan mengintervensi ketika ada warganya

(khususnya anak-anak) yang hak dasarnya (gizi) tidak terpenuhi, demi menciptakan kesetaraan peluang.

b. ICESCR (Kovenan Hak Ekosob): Kewajiban Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kovenan ini secara eksplisit mengakui "hak atas pangan yang memadai" (*the right to adequate food*).

Ratifikasi ini berarti Indonesia memiliki tiga kewajiban: menghormati, melindungi, dan memenuhi (*to respect, protect, fulfil*) hak tersebut. Program Makan Bergizi Gratis adalah bentuk paling langsung dari kewajiban "memenuhi" (*to fulfil*). Negara secara proaktif menggunakan sumber dayanya (anggaran negara) untuk menyediakan pangan bergizi langsung kepada individu yang berhak, dalam hal ini anak-anak sekolah.

c. UU No. 35/2014 (Perubahan UU No. 23/2002) tentang Perlindungan Anak

UU ini mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat, serta mendapat perlindungan. Ini secara spesifik mencakup hak atas standar kesehatan dan gizi yang memadai.

UU ini mempersempit fokus kewajiban negara dari "seluruh rakyat" (di UUD) menjadi "setiap anak". Program ini menjadi terjemahan konkret dari perlindungan khusus tersebut. Dengan menyoal anak-anak usia sekolah, negara sedang menjalankan amanat UU Perlindungan Anak untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal, yang sangat bergantung pada asupan gizi di usia emas.

d. UU No. 18/2012 tentang Pangan

UU Pangan mengatur tentang Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Negara bertanggung jawab atas "ketersediaan" dan "aksesibilitas" pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh rakyat.

UU Pangan adalah kerangka kerja sektoral-nya. Jika UUD 1945 adalah "mengapa", UU Pangan adalah "bagaimana". Program MBG diterjemahkan sebagai kebijakan intervensi untuk menjamin aksesibilitas pangan bagi kelompok yang tidak mampu mengaksesnya sendiri (anak-anak). Seperti yang disinggung dalam perbandingan hukum oleh (Suwoto Mulyosudarmo et al., 2025), program ini adalah instrumen kebijakan yang umum digunakan negara untuk melaksanakan mandat UU Pangan-nya.

Penelitian oleh (Suwoto Mulyosudarmo et al., 2025) dalam analisis perbandingan hukumnya dengan Belanda, menegaskan bahwa program makan bergizi di sekolah memiliki landasan hak konstitusional yang kuat. Program ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin "ketersediaan" (*availability*) dan "aksesibilitas" (*accessibility*) pangan bagi warganya, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan. Analisis mereka menunjukkan bahwa negara (dalam hal ini Indonesia) memiliki mandat hukum untuk merumuskan kebijakan yang secara proaktif memenuhi hak tersebut (Jangka et al., 2025).

Kewajiban ini juga bersumber dari amanat keadilan sosial, sebagaimana dianalisis oleh (Kiftiyah et al., 2025a). Mereka memandang Program MBG dari

perspektif Sila kelima Pancasila. Dalam konteks ini, program MBG adalah wujud "keadilan distributif", di mana negara wajib mengintervensi untuk memastikan anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang beruntung mendapatkan hak yang sama atas gizi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesetaraan peluang pendidikan. Pandangan serupa diungkapkan oleh (Oktawila & Estu Bagijo, 2025), yang secara eksplisit mengaitkan program ini dengan pemenuhan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, secara yuridis-filosofis, Program MBG adalah pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) yang berdimensi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban: Tantangan Kritis Penentuan Sasaran (Targeting)

Pelaksanaan kewajiban negara (implementasi) adalah titik uji paling kritis. Sebuah program yang didesain dengan landasan hak yang kuat dapat gagal total jika mekanisme pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Judul artikel ini menyoroti "Kewajiban Terlaksana Tepat Sasaran" sebagai fokus utama.

Studi oleh (Kiftiyah et al., 2025a) secara langsung mempertanyakan "apakah program tersebut tepat sasaran". Dalam konteks program sosial di Indonesia, tantangan penentuan sasaran (*targeting*) selalu menjadi masalah krusial, yang diwarnai oleh *exclusion errors* (mereka yang berhak tidak dapat) dan *inclusion errors* (mereka yang tidak berhak justru mendapat).

Tantangan terbesar dalam implementasi MBG bukan hanya pada ketersediaan makanan, melainkan pada tata kelola distribusi dan infrastruktur. (Yelvianti, 2025) dalam tinjauannya menemukan bahwa kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan makanan dan distribusi yang tidak merata masih menjadi penghambat utama. Tanpa infrastruktur rantai pasok yang memadai, risiko makanan menjadi tidak layak konsumsi akan meningkat, yang pada gilirannya menggagalkan tujuan pemenuhan gizi.

Selain itu, isu keamanan pangan menjadi sorotan kritis. (Sumantri Riyanto et al., 2025) menekankan perlunya reformasi sistemik dalam pengawasan mutu makanan. Investasi pada kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas terkait di daerah—mulai dari tenaga ahli hingga laboratorium uji—adalah syarat mutlak agar program ini tidak berubah menjadi ancaman kesehatan massal. Tanpa pengawasan yang ketat (SOP yang jelas), "kewajiban" negara untuk melindungi warga negara belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

Meskipun jurnal yang dilampirkan tidak secara teknis merinci metodologi DTKS, analisis normatif oleh (Suwoto Mulyosudarmo et al., 2025) menyoroti "kelemahan, kekuatan, peluang, dan risiko" dari kebijakan ini. Risiko terbesar dalam pelaksanaan kewajiban adalah kegagalan dalam penargetan, yang mencederai prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Jika program ini gagal menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, maka negara dapat dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban esensialnya untuk melindungi kelompok paling rentan (Albaburrahim et al., 2025).

Evaluasi Standar Pemenuhan Hak: Kualitas Gizi, Ketersediaan, dan Aksesibilitas

Pemenuhan hak atas pangan tidak berhenti pada "adanya makanan", tetapi pada "adanya makanan yang bergizi". Ini menyentuh inti dari Tujuan Khusus ketiga: standar pemenuhan hak (*standards of fulfillment*). Hak atas pangan yang memadai mencakup standar kualitas (gizi dan keamanan pangan), ketersediaan (distribusi merata), dan aksesibilitas (dapat dijangkau oleh semua yang berhak). Dalam perspektif Pancasila, program ini merupakan implementasi konkret dari Sila Kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". (Kiftiyah et al., 2025) menegaskan bahwa MBG bertujuan memberikan kesejahteraan yang merata, di mana negara harus memprioritaskan sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Nias, Mentawai, dan Musi Rawas Utara agar kesenjangan sosial dapat direduksi.

Lebih jauh, hak atas pangan yang aman dan sehat adalah fondasi esensial bagi tumbuh kembang anak yang dijamin oleh instrumen hukum internasional maupun UUD 1945. Namun, (Sumantri Riyanto et al., 2025) menyoroti bahwa pemenuhan hak ini menghadapi risiko serius terkait keamanan pangan (*food safety*). Insiden keracunan makanan yang mungkin terjadi dalam program massal ini menunjukkan celah dalam penjaminan hak anak. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada penyediaan anggaran, tetapi mencakup pertanggungjawaban administrasi, perdata, hingga pidana jika terjadi kelalaian yang mencederai kesehatan penerima manfaat.

Salah satu isu dalam memastikan "Kewajiban Terlaksana" adalah ketersediaan dan keberlanjutan anggaran. (Aiza Yolanda, 2025) mencatat bahwa program ini membutuhkan anggaran fantastis, mulai dari Rp100 triliun pada tahun pertama hingga potensi Rp460 triliun pada tahun 2029. Beban fiskal ini menjadi tantangan besar di tengah kewajiban pembayaran utang negara dan subsidi energi yang masih tinggi. Kegagalan dalam mengelola ruang fiskal ini berpotensi menjadikan program ini sebagai "beban baru" daripada solusi, yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Trisno Aji, 2025) juga memberikan kritik tajam mengenai besarnya kebutuhan anggaran harian yang mencapai Rp800 miliar. Perdebatan mengenai standar gizi versus biaya (makan gratis vs makan bergizi) harus diselesaikan agar tidak terjadi inefisiensi. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada stabilitas kebijakan dan komitmen anggaran yang transparan dan akuntabel.

Kerangka Akuntabilitas Hukum dan Kelembagaan

Ketika negara melaksanakan kewajiban yang didanai publik, harus ada mekanisme akuntabilitas yang jelas. Tujuan Khusus keempat mengkaji kerangka akuntabilitas ini: Apa yang terjadi jika program gagal, dan ke mana warga (penerima hak) dapat mengadu?

Studi oleh (Oktawila & Estu Bagijo, 2025) tentang "Kedudukan Lembaga Negara" menjadi sangat relevan di sini. Pembentukan lembaga baru seperti Badan Gizi Nasional (BGN), yang disinggung dalam referensi mereka, adalah upaya negara untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang akuntabel. Penelitian ini mengkaji

bagaimana lembaga negara (baik yang sudah ada maupun yang baru) akan beroperasi, berkoordinasi, dan bertanggung jawab atas program masif ini (Ajeng Atikah Merlinda, 2025).

Analisis perbandingan hukum oleh (Suwoto Mulyosudarmo et al., 2025) juga penting untuk melihat bagaimana akuntabilitas diatur. Dengan membandingkan Indonesia dan Belanda, kita dapat mengkaji model pengawasan (baik internal, parlementer, maupun publik) yang efektif. Kerangka akuntabilitas hukum ini penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya terlaksana, tetapi juga terlaksana dengan tata kelola yang baik (*good governance*), transparan, dan bebas dari korupsi, sehingga hak anak atas gizi benar-benar terpenuhi (Andi Weyana Nurul Khatimah et al., 2025).

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merepresentasikan pergeseran paradigma kebijakan publik di Indonesia, dari sekadar bantuan sosial yang bersifat karitatif menjadi manifestasi konkret kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak konstitusional anak atas pangan dan gizi. Secara yuridis, program ini memiliki landasan yang kokoh dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai instrumen keadilan sosial. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari mandat konstitusional menuju realitas implementasi masih menghadapi kesenjangan yang signifikan.

Tantangan utama terletak pada aspek "ketepatan sasaran" yang terdistorsi oleh validitas data penerima yang belum terbarukan, kompleksitas rantai pasok logistik di wilayah kepulauan, serta risiko keamanan pangan yang mengancam kesehatan siswa. Selain itu, besarnya beban fiskal menuntut efisiensi ketat agar program ini tidak mengorbankan stabilitas anggaran negara. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari terbangunnya tata kelola yang akuntabel, transparansi data yang terintegrasi, serta pelibatan partisipasi publik dalam pengawasan. Tanpa pembenahan fundamental pada mekanisme pelaksanaannya, hak warga negara hanya akan menjadi narasi normatif, dan kewajiban negara berpotensi gagal terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiza Yolanda, A. (2025). *ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN APBN*.
- Ajeng Atikah Merlinda, Y. Y. (2025). *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan*.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.vii.19191>
- Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, & A. Octamaya Tenri Awaru. (2025). *Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak*

Free Nutritional Meal Program: Ensuring Rights Are Fulfilled and Obligations Are Implemented on Target

Anggraini Oktavia Ramadhani, Desi Alia Putri Astuti

- Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>
- Behrman, J. R. (2020). The Economic Rationale for Investing in Nutrition in Developing Countries. In *World Development* (Vol. 2, Issue 1).
- Jangka, D., Program, P., Gratis, M. B., Kesehatan, T., Pendidikan, K., Cenderawasih, U., Jayapura, U. T., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). *THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY* Rif'iy Qomarrullah 1 Suratni 2.
- Kevin Andreas Halomoan Tambunan, Ridha Nababan, Rimma Anisa Siagian, Roslin Naiborhu, Sintia Harianti, & Jamaludin Jamaludin. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 21–31. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025a). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1) 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025b). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Oktawila, D., & Estu Bagijo, H. (2025). *Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis*.
- Sumantri Riyanto, O., Rianita Elfrida Sinaga, M., & Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta, S. (2025). *PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA*.
- Suwoto Mulyosudarmo, S., Cornelis, V. I., Siregar, F. E., Marwiyahp, S., & Prawesthi, W. (2025). *FREE NUTRITIOUS SCHOOL MEAL PROGRAMS IN INDONESIA AND THE NETHERLANDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL FOUNDATIONS AND CONSTITUTIONAL RIGHTS PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH INDONESIA DAN BELANDA: ANALISIS PERBANDINGAN LANDASAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL* (Vol. 4, Issue 2).
- Trisno Aji, W. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Yelvianti, T. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN GIZI GRATIS (MBG) PRESIDEN PRABOWO TERHADAP KUALITAS GIZI DAN PENDIDIKAN PARA SISWA DI INDONESIA. *Jurnal Sehat Mandiri*, 20.